



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 96 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota, serta Pasal 3 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh, belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota serta masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung perkembangan penyelenggaraan penanaman modal sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

6. Peraturan / 2

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang melayani promosi dan pelayanan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

5. Penanaman /3

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Aceh.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Aceh yang selanjutnya disebut RUPM Aceh adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang dimaksudkan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Aceh.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RUPM Aceh.
- (2) RUPM Aceh merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (3) RUPM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Sistematika RUPM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ASAS DAN TUJUAN
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN
BAB V : PETA PANDUAN
BAB VI : PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh menyusun RUPM Aceh mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi Aceh.
- (2) RUPM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan Badan Investasi dan Promosi Aceh.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Aceh, SKPA dan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Badan Investasi dan Promosi Aceh dengan melibatkan SKPA dan lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 6 /4

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 132) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

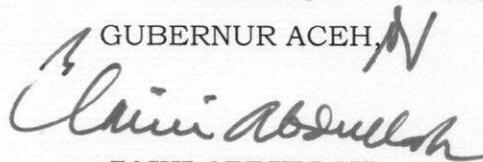
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Desember 2014
16 Shafar 1436

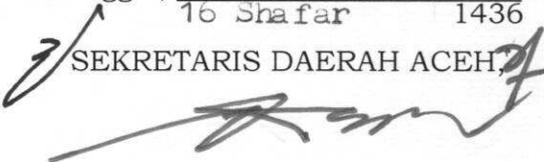
GUBERNUR ACEH,



ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Desember 2014
16 Shafar 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH



DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 78

Fase II (2017-2020)

A. Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/

1. (Agro Industri Tanaman Pangan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun				Institusi	
				2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Peningkatan koorInstansi Bidangi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tenaga kerja dan kependudukan

2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota yang siap dipasarkan	Melaksanakan koorInstansi Bidangi dan penyusunan peluang strategis investasi di Kabupaten/Kota	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan dan perkebunan diPemerintah Kabupaten /Kota.
		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	Melaksanakan koorInstansi Bidangi dan indentifikasi permasalahan/ hambatan realisasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan dan perkebunan diPemerintah Kabupaten /Kota.
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang agroindustri tanaman pangan.	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan yang terkait	X	X	X	X	BAPPEDA	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi, Instansi membidangi bidang pertanian, perkebunan dan tanaman pangan. PemKab/Kota, KADIN
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan masyarakat lokal terkait dengan bidang agroindustri tanaman pangan	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat/ tenaga kerja lokal yang berusaha dalam bidang agroindustri tanaman pangan.	X	X	X	X	Instansi membidangi tanaman pangan. Instansi membidangi tenaga kerja.	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Memasukkan keterampilan terkait agroindustri tanaman pangan dalam salah satu bidang pelatihan pada balai latihan kerja.	X	X	X	X	Instansi membidangi tanaman pangan. Instansi membidangi tenaga kerja.	Pemkab/kota BapedaPemerintah Kabupaten /Kota Instansi membidangi tanaman pangan diPemerintah Kabupaten /Kota. Instansi Penanaman

									Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Mempersiapkan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak program pengembangan agroindustri tanaman pangan	Mengevaluasi kualitas proses belajar mengajar terutama pada program studi yang berkaitan dengan agroindustri tanaman pangan.	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Instansi Bidang Pendidikan	Pemkab/kota Bappeda Pemerintah Kabupaten /Kota Instansi membidangi tanaman pangan di Pemerintah Kabupaten /Kota Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Mengidentifikasi kesesuaian keterampilan dan kemampuan mahasiswa/peserta didik pada akademi komunitas dengan mengacu pada tuntutan ketearampilan bidang agroindustri tanaman pangan.	X	X	X	X	Instansi membidangi tanaman pangan. Instansi membidangi tenaga kerja Balai Latihan Kerja Kopertis Wilayah XIII	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Institusi Terkait Lainnya
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman bidang agroindustri tanaman pangan berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang agroindustri tanaman pangan yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan Instansi membidangi Lingkungan Hidup BAPPEDA, PemKab/Kota,
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	X	Instansi membidangi tanaman pangan	Instansi membidangi Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/ atau insentif dengan instansi terkait dan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan Instansi membidangi Lingkungan Hidup PemKab/Kota,

		lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kabupaten/ Kota						
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan Instansi membidangi Lingkungan Hidup PemKab/Kota,
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan yang merupakan UKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan. Instansi membidangi Koperasi dan UKM
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha agroindustri tanaman pangan dan hasil dengan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar agroindustri tanaman pangan dengan UKM	X	X	X	X	Instansi membidangi tanaman pangan. Instansi membidangi Koperasi dan UKM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Pengembangan peluang investasi bidang agroindustri tanaman pangan dan hasil bumi yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X	Instansi membidangi tanaman pangan. Instansi membidangi Koperasi dan UKM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Institusi Perizinan. Instansi membidangi tanaman pangan. BAPPEDA Aceh, BAPPEDA Pemerintah Kabupaten /Kota,

8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi membidangi tanaman pangan.	BAPPEDA Instansi membidangi tanaman pangan.
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha tanaman pangan dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha tanaman pangan	X	X	X	X	Instansi membidangi tanaman pangan.	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh.

Fase II (2017-2020)

**Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/
2. (Agroindustri berbasis Komoditas Perkebunan)**

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun				Institusi	
				2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koorInstansi Bidang dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	dan Inststitusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Pembaharuan data proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koorInstansi Bidang dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi kehutanan dan perkebunan Badan Pertanahan
		Peningkatan koorInstansi Bidang untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koorInstansi Bidang dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	X	X	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh, Instansi BidangKehutana n, Perkebunan
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi terkait Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota yang siap dipasarkan	Melaksanakan koorInstansi Bidang dan penyusunan peluang strategis investasi di Kabupaten/Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Kabupaten /Kota

		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	Melaksanakan koorInstansi Bidangi dan indentifikasi permasalahan/ hambatan realisasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Kabupaten /Kota
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang perkebunan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal berdasarkan komoditi perkebunan pada masing-masing daerah potensial.	X	X	X	X	Instansi BidangPerkebunan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan masyarakat lokal terkait dengan bidang perkebunan	Meningkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat/tenaga kerja yang bergerak dalam bidang perkebunan	X	X	X	X	Instansi BidangPerkebunan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman bidang usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan	Melakukan pemantauan lingkungan hidup terkait kegiatan penanaman modal.	X	X	X	X	Instansi BidangLingkungan Hidup	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi	Kabupaten/ Kota
6	Meningkatkan Pemberdayaan	Mengidentifikasi faktor determinan	Melakukan langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara	X	X	X	X	Instansi BidangKoperasi dan	Instansi Penanaman

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	peningkatan kinerja koperasi terutama koperasi simpan pinjam.	koperasi dan bidang usaha perkebunan.					UKM Instansi Bidang perkebunan	Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Pemerintah Kabupaten / Kota
		Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM Instansi Bidang perkebunan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perkebunan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UKM, sesuai peraturan yang berlaku	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara usaha perkebunan dengan UKM	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM Instansi Bidang perkebunan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
	Optimalisasi keterkaitan bidang usaha perkebunan besar dengan koperasi dan UKM	Pengembangan peluang investasi bidang perkebunan yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM Instansi Bidang perkebunan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM Instansi Bidang perkebunan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	

7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perkebunan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Menyusun potensi investasi di bidang usaha perkebunan dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Bidang perkebunan	BAPPEDA
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha perkebunan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha perkebunan dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang perkebunan
		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (<i>well targeted</i>)	Mengikuti pameran investasi di bidang usaha perkebunan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang perkebunan

Fase II (2017-2020)

Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/

3. (Agroindustri Bidang Peternakan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun				Institusi	
				2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Inststitusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang Sian direalisasikan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang peternakan. Badan Pertanahan
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidangpeternakan. Badan Pertanahan
		Peningkatan koorInstansi Bidangi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidangpeternakan. Badan Pertanahan
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang peternakan. Badan Pertanahan

2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi peternakan di Kabupaten/Kota yang siap dipasarkan	Melaksanakan koordinasi Instansi Bidang dan penyusunan peluang strategis investasi di Kabupaten/Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Institusi Perizinan Instansi Bidang peternakan.
		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	Melaksanakan koordinasi Instansi Bidang dan indentifikasi permasalahan/hambatan realisasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Aceh	Institusi Perizinan Instansi Bidang peternakan
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang peternakan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal berdasarkan jenis usaha peternakan pada masing-masing daerah potensial.	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Institusi Perizinan Instansi Bidang peternakan
			Mendorong penanaman modal bidang peternakan mengacu pada prioritas potensi usaha peternakan yang sudah diidentifikasi.	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Institusi Perizinan Instansi Bidang peternakan
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan masyarakat lokal terkait dengan bidang peternakan	Meningkatkan intensitas pelatihan bidang peternakan.	X	X	X	X	Instansi Bidang peternakan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Mempersiapkan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak	Mengevaluasi efektifitas pembelajaran pada akademi komoditas yang berorientasi pada tenaga kerja untuk mendukung	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Pemkab/Kota DPR Pemerintah	Pemkab/kota Bappeda Pemerintah Kabupaten /Kota

		program pengembangan peternakan	sektor peternakan.					Kabupaten /Kota	Instansi Bidangpeternakan. Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Memastikan program studi dibuka pada Akademi Komoditas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan usaha bidang peternakan.	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII	Pemkab/kota BapedaPemerintah Kabupaten /Kota Instansi Bidangpeternakan. Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan usaha peternakan.	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat/tenaga lokal yang berusaha dalam bidang peternakan.	X	X	X	X	Instansi Bidangpeternakan . Instansi Bidangtenaga kerja.	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Institusi Terkait Lainnya
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Bidangpeternakan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi BidangLingkung

		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang peternakan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk "the Green Investor"	X	X	X	X	Instansi Bidangpeternakan	an Hidup Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi BidangLingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Bidangpeternakan	SKPK Bidang peternakan
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang peternakan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk "the Green Investor"	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi	Instansi Bidangpeternakan
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	Mengidentifikasi faktor determinan peningkatan kinerja koperasi terutama koperasi simpan pinjam.	Merumuskan model kompetensi pengelolaan koperasi di kabupaten kota.	X	X	X	X	Instansi BidangKoperasi dan UKM Instansi terkait lainnya	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara koperasi dan bidang usaha peternakan.	X	X	X	X	Instansi BidangKoperasi dan UKM. Instansi Bidangpeternakan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Pemerintah

									Kabupaten / Kota
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasi Instansi Bidang lain langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang peternakan .	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha peternakan besar dengan koperasi dan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara usaha peternakan dengan UKM	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang peternakan .	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Pengembangan peluang investasi bidang peternakan yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang peternakan .	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasi Instansi Bidang lain langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi Bidang peternakan .	Pemerintah Kabupaten/ Kota

8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha peternakan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha peternakan dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi Bidangpeternakan .	BAPPEDA
		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (<i>well targeted</i>)	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha peternakan dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang peternakan. KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha peternakan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang peternakan.

Fase II (2017-2020)

Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/

4. (Pengembangan Bidang Perikanan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun				Institusi	
				2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Instansi Bidang perikanan Instansi terkait
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang Siap direalisasikan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Instansi Bidang perikanan Instansi terkait
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Instansi Bidang perikanan Instansi terkait
		Peningkatan koorInstansi Bidangi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n Badan Pertanahan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
2	Mendorong Persebaran	Menginventarisasi dan mengiidentifikasi	Menginventarisasi dan mengiidentifikasi prasarana dan	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana	Instansi Bidang Pengairan

	Penanaman Modal	prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan prasarana perbenihan, pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya	perencanaan tata ruang budidaya					n Badan Pertanahan	
			Menginventarisasi dan mengidentifikasi pengembangan sarana dan prasarana perbenihan	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi Bidang Pengairan
			Menginventarisasi dan mengidentifikasi pengembangan produksi dan budidaya usaha	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi Bidang Pengairan
			Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi terkait
			BerkoorInstansi Bidangi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perikanan budidaya	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi terkait
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang perikanan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal berdasarkan jenis usaha perikanan pada masing-masing daerah potensial.	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi penanaman modal dan perizinan
			Mendorong penanaman modal bidang perikanan mengacu pada prioritas potensi usaha perikanan yang sudah diidentifikasi.	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi penanaman modal dan perizinan
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha perikanan	Mendorong pelatihan berkaitan pengembangan budidaya perikanan.	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n Instansi Bidangtenaga kerja dan kependudukan	Instansi/ lembaga terkait
			Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam meningkatkan	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana	Lembaga terkait termasuk LSM

			kemampuan masyarakat dalam budaya perikanan.					n Instansi Bidangtenaga kerja dan kependudukan	
		Mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja bidang perikanan.	Mengevaluasi program pendidikan pada akademi komunitas yang berkaitan dengan bidang perikanan. Mendorong peningkatan kualitas belajar-mengajar pada akademi komunitas terutama program studi bidang perikanan.	X	X	X	X	Kopertis Wil XIII Instansi Bidangperikana n	DPR Kabupaten/ Kota Pemkab/kota
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan usaha bidang perikanan	Menyiapkan dan meningkatkan profesionalitas tenaga teknis dan melakukan penyuluhan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha budidaya perikanan. Meningkatkan intensitas penyuluhan bagi masyarakat guna meningkatkan hasil produksi perikanan.	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Lembaga terkait
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman bidang usaha perikanan yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha perikanan yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi Bidang Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme money untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	X	Instansi Bidangperikana n	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi

									BidangLingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perikanan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota					Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi	Instansi Bidang perikanan Pemkab/kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang perikanan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi	Instansi Bidang perikanan
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	Mengidentifikasi usaha koperasi yang terkait dengan bidang perikanan.	Merumuskan model kompetensi pengelolaan koperasi bidang perikanan.	X	X	X	X	Instansi BidangKoperasi dan UKM Instansi terkait lainnya	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara koperasi dan bidang usaha perikanan.	X	X	X	X	INSTANSIBidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidangperikanan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Pemerintah Kabupaten /Kota
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perikanan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UKM, sesuai peraturan yang	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	X	X	X	X	INSTANSIBidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang perikanan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

		berlaku							
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha perikanan dengan koperasi dan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara usaha perikanan dengan UKM	X	X	X	X	INSTANSI Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang perikanan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Pengembangan peluang investasi bidang perikanan yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X	INSTANSI Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang perikanan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perikanan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Bidang perikanan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha perikanan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha perikanan dan sektor pendukungnya.	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi Bidang perikanan	BAPPEDA
			Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha perikanan dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan	Instansi Bidang perikanan KADIN

								Perizinan Aceh	
		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (<i>well targeted</i>)	Mengikuti pameran investasi di bidang usaha perikanan.	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang perikanan

Fase II (2017-2020)

B. Fokus Pengembangan Infrastruktur

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun				Institusi	
				2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk permohonan izin di bidang usaha infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	P2T dan Inststitusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur	X	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi terkait	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di focus investasi sektor-sektor lain	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi skala besar di sektorsektor fokus yang lain	X	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi terkait	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi skala besar di sektor-sektor yang lain	X	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi terkait	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang infrastruktur
		Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah wilayah yang diprioritaskan	Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang infrastruktur	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang peluang secara rinci di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang infrastruktur	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pengembangan klaster wilayah dengan kebutuhan investasi sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pengembangan daya saing wilayah yang diprioritaskan Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pengembangan sektor infrastruktur yang berdaya	X	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang infrastruktur	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

			saing tinggi, skala besar, dan mendukung daya saing daerah						
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan(hulu - hilir, jenis komoditas, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang infrastruktur	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Mengevaluasi output proses perkuliahan kelas jauh yang dilaksanakan oleh PTS-PTS di Aceh.	Menutup seluruh proses kuliah kelas jauh yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Swasta yang melanggar ketentuan perundang-undangan.	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII	DPRD Pemerintah Kabupaten /Kota Pemerintah Kabupaten /Kota
			Melakukan pembinaan PTS dengan mengacu pada permendiknas dan Dirjen Dikti serta peraturan terkait.	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII	Lembaga Pendidikan Tinggi terkait.
		Mempermudah perizinan pendirian perguruan tinggi yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM.	Meningkatkan koorInstansi Bidang dan kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.	X	X	X	X	Lembaga Pendidikan Tinggi Kopertis Wilayah XIII PemdaPemerintah Kabupaten /Kota	DPRD Pemerintah Kabupaten /Kota
			Merekomendasikan pendirian PTS dengan program studi terapan sesuai dengan kebutuhan.	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII	Pemda Pemerintah Kabupaten /Kota DPRD Pemerintah Kabupaten /Kota

		Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam mendukung pembangunan infrastruktur	Melaksanakan pelatihan tenaga kerja berkaitan dengan pembangunan infrastruktur	X	X	X	X	PemdaPemerintah Kabupaten /Kota BLKPemerintah Kabupaten /Kota	Instansi/ Lembaga terkait
			Memprioritaskan penggunaan perusahaan/tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek infrastruktur di daerah dengan mengacu pada kualifikasi yang dibutuhkan.	X	X	X	X	Perusahaan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur.	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang infrastruktur
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Lingkungan Hidup Instansi Bidang infrastruktur
			Menyusun mekanisme money untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	X	Instansi Bidang lingkungan hidup.	Instansi Bidang infrastruktur
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi terkait

		Pemberian pengakuan publik untuk investor di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Lingkungan Hidup
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di sektor infrastruktur skala besar yang menyerap/memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM Instansi terkait	Pemerintah Kabupaten /Kota
		Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan koperasi dan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara bidang infrastruktur dengan koperasi dan UKM	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM Instansi terkait	Pemerintah Kabupaten /Kota
			Pengembangan peluang investasi bidang infrastruktur yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM Instansi terkait	Pemerintah Kabupaten /Kota

7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Pemerintah Kabupaten /Kota Instansi terkait	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Bina Marga BAPPEDA
		Mengikuti pameran investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Bina Marga BAPPEDA	
		Menyelenggarakan business meeting dengan investor di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Instansi Bidang Bina Marga BAPPEDA	

			daerah secara keseluruhan					Aceh	
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	------	--

Fase II (2017-2020)

C. Fokus Pengembangan Energi

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun				Institusi	
				2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh untuk permohonan izin di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Melakukan koorInstansi Bidang dengan Instansi Bidang terkait dan Pemkab/ Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	dan Inststitusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Instansi Bidang ESDM
		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk pengembangan sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk pengembangan sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Badan Pertanahan Instansi Bidang ESDM
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi dan yang terkait	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi
		energi untuk investasi	Melakukan koorInstansi Bidang aktif dan menyusun kerjasama penyediaan	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang	Instansi Penanaman

		skala besar dan berdaya saing tinggi	infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait					ESDM	Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi alternative dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi
			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan					BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang peluang secara rinci di bidang usaha energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi, di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi
		Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi yang berdaya saing tinggi	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi
			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pengembangan klaster bidang	X	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan

			energi yang berdaya saing tinggi						Perizinan Provinsi
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi (hulu - hilir, keterkaitan antarindustri, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM Pembkab/kota
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi bidang energi	Melakukan sosialisasi program pengembangan energi kepada masyarakat di daerah kawasan pengembangan usaha sektor energi.	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang ESDM Pembkab/kota
		Menyusun kebijakan yang berorientasi pada prioritas penggunaan tenaga kerja lokal bagi investor bidang energi	Menyusun pedoman pemanfaatan tenaga kerja bagi setiap usaha sektor energi dengan mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja lokal.	X	X	X	X	Instansi Bidang Tenaga Kerja Instansi Bidang ESDM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal untuk dapat bekerja pada perusahaan bidang	Menyusun peta kompetensi tenaga kerja lokal berkaitan dengan investasi bidang energi	X	X	X	X	Instansi Bidang Tenaga Kerja Instansi Bidang ESDM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

		energi							Aceh
			Mengevaluasi akademi komoditas yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja guna mendukung pengembangan sektor energi di daerah yang memiliki potensi energi	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Pemkab/kot DPR Kabupaten /Kota	Pemkab /kota BapedaPemerintah Kabupaten /Kota Instansi Bidang ESDM Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman pengembangan investasi energi alternatif skala besar yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan pengembangan investasi alternatif yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X	Instansi Bidang Lingkungan Instansi terkait	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi
Meninjau dan menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan			X	X	X	X	Instansi Bidang Lingkungan Instansi terkait	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi	
Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi dalam pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang		Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Bidang ESDM Instansi Bidang Lingkungan PemdaPemerintah Kabupaten /Kota	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi	

		berlaku							
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pengembangan energi alternatif skala besar yang berwawasan lingkungan	Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Lingkungan Instansi Bidang ESDM
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk pengembangan energi skala besar yang melibatkan UKM atau menyerap tenaga kerja lokal, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Bidang ESDM Instansi Bidang Koperasi dan UKM	dan Institusi perizinan Pemerintah Kabupaten /Kota Pemda Pemerintah Kabupaten /Kota Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi

7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di bidang energi dan energi alternatif skala besar yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Bidang ESDM Instansi Bidang Koperasi dan UKM	dan Institusi perizinan Pemerintah Kabupaten /Kota Pemda Pemerintah Kabupaten /Kota Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	X	Instansi Bidang ESDM Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA Pemerintah Kabupaten /Kota
		Pengembangan strategi promosi yang <i>welltargeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang ESDM
			Mengikuti pameran investasi di bidang investasi energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan	Instansi Bidang ESDM

			besar dan berdaya saing tinggi					Perizinan Aceh	
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	KADIN Instansi Bidang ESDM

Fase II (2017-2020)

D. Fokus Pengembangan Pariwisata

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun				Institusi	
				2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh untuk permohonan izin di bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah.	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan.	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Kabupaten/ Kota Instansi Bidang pariwisata
		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk bidang usaha pariwisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun daerah tujuan wisata.	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisat a Badan Pertanahan	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh BAPPEDA
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisat a	Bapeda

			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh BAPPEDA	Instansi Bidang pariwisata dan Instansi Bidang PU Kab/Kota. Instansi Bidang perhubungan Asosiasi Industri Pariwisata
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pariwisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan DTW baru, DTW berbasis kebudayaan, atau meningkatkan daya saing DTW yang telah ada.	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisat a. BAPPEDA Kab/Kota,	Instansi penanaman modal dan perizinan. Instansi Bidang infrastruktur BAPPEDA Aceh BAPPEDAPemeri ntah Kabupaten /Kota,
			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	X	BAPPEDA. Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Aceh	Instansi Bidangpariwisata Instansi Bidang PU Kab/Kota. Instansi Bidang perhubungan Asosiasi Industri Pariwisata
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata	Menyusun kajian dan dokumen peluang peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan yang terkait di kawasan pengembangan pariwisata	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Aceh	Instansi Bidang pariwisata. Asosiasi Industri Pariwisata

		Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata yang berdaya saing tinggi di kawasan pengembangan pariwisata	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisata	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Aceh
			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka pengembangan kawasan strategis pariwisata	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisata	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Aceh
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan strategis pariwisata	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisata	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Aceh
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan program pariwisata daerah	Menyusun kajian persepsi masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisata	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan sosialisasi program pengembangan pariwisata daerah kepada masyarakat di daerah tujuan wisata.	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisata	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

		Mempersiapkan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak program pengembangan pariwisata	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam mendukung program pariwisata daerah.	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisata	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Mengevaluasi akademi komunitas yang berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia bidang pariwisata di daerah tujuan utama wisata	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Pariwisata DPR Kabupaten /Kotaa	PemerintahPemerintah Kabupaten /Kota BapedaPemerintah Kabupaten /Kota Instansi Bidang Pariwisata Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Meningkatkan kualitas lulusan akademi komunitas dengan mengacu pada kebutuhan dan tuntutan pengembangan program pariwisata daerah.	X	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Instansi Bidangpariwisata DPR Kabupaten /Kotaa	PemerintahPemerintah Kabupaten /Kota Bapeda
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)	Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisata. INSTANSILingkungan Hidup	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan	X	X	X	X	Instansi Bidangpariwisata.	Instansi Penanaman Modal dan

			Lingkungan					INSTANSI Lingk ungan Hidup	Pelayanan Perizinan Aceh
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Pariwisata, INSTANSI Bidang Perhubungan.
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	X	Instansi Bidang pariwisata a. INSTANSI Lingk ungan Hidup	Instansi Bidang Pariwisata,
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang merupakan UKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Pariwisata,
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata besar dengan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dengan UKM	X	X	X	X	Instansi Bidang pariwisata a. Instansi Bidang koperasi dan UKM	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	X	Instansi Bidang pariwisata a. Instansi Bidang koperasi	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

								dan UKM	Aceh
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota					Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Pariwisata, BAPPEDA Provinsi, Bappeda Kabupaten Kota KADIN Aceh
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi pariwisata BAPPEDA Aceh, Bappeda Pemerintah Kabupaten /Kota KADIN Aceh
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi pariwisata
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata	X	X	X	X	Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi pariwisata

Fase III (2021-2025)

A. Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/

1. (Agro Industri Berbasis Tanaman Pangan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			Institusi	
				2021-2022	2023-2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Inststitusi Perizinan Kabupaten/ Kota
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Inststitusi Perizinan Kabupaten/ Kota
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koorinstansi Bidangi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Inststitusi Perizinan Kabupaten/ Kota
		Peningkatan koorInstansi Bidangi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh, Badan Pertanahan Nasional Aceh	Inststitusi Perizinan Kabupaten/ Kota. Badan BPN Kabupaten/ Kota
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan	Instansi Bidang tenaga kerja dan kependudukan

							Perizinan Aceh	
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota yang siap dipasarkan	Melaksanakan koorInstansi Bidang dan penyusunan peluang strategis investasi di Kabupaten/Kota	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi pertanian dan tanaman pangan
		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	Melaksanakan koorInstansi Bidang dan indentifikasi permasalahan/hambatan realisasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi pertanian dan tanaman pangan
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang agroindustri tanaman pangan.	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan yang terkait	X	X	X	BAPPEDA	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh, Instansi Bidang Pertanian, Instansi membidangi Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, KADIN
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan masyarakat lokal terkait dengan bidang agroindustri tanaman pangan	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat/ tenaga kerja lokal yang berusaha dalam bidang agroindustri tanaman pangan.	X	X	X	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi tenaga kerja	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

			Memasukkan keterampilan terkait agroindustri tanaman pangan dalam salah satu bidang pelatihan pada balai latihan kerja.	X	X	X	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi tenaga kerja	Pemerintah Kabupaten/ Kota Bapeda Kabupaten/ Kota Disbun Kabupaten/ Kota Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Mempersiapkan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak program pengembangan agroindustri tanaman pangan	Mengevaluasi kualitas proses belajar mengajar terutama pada program studi yang berkaitan dengan agroindustri tanaman pangan.	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Instansi Bidang Pendidikan	Pemerintah Kabupaten/ Kota Bapeda Kabupaten/ Kota Instansi membidangi Tanaman Pangan. Kabupaten/ Kota Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Mengidentifikasi kesesuaian keterampilan dan kemampuan mahasiswa/peserta didik pada akademi komunitas dengan mengacu pada tuntutan ketearampilan bidang agroindustri tanaman pangan.	X	X	X	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi tenaga kerja Kopertis Wilayah XIII	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Institusi Terkait Lainnya

5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman bidang agroindustri tanaman pangan berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang agroindustri tanaman pangan yang berwawasan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi Lingkungan Hidup BAPPEDA, Pemerintah Kabupaten/ Kota,
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	Instansi membidangi Tanaman Pangan.	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/ atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPekot	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi Lingkungan Hidup
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan dan hasil bumi yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi Lingkungan

								Hidup
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan yang merupakan UKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPekot	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi Koperasi dan UKM
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha agroindustri tanaman pangan dan hasil dengan UKM	Pengembangan model kerjasama intiplasma atau keterkaitan antar agroindustri tanaman pangan dengan UKM	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi Koperasi dan UKM
			Pengembangan peluang investasi bidang agroindustri tanaman pangan dan hasil bumi yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Tanaman Pangan. Instansi membidangi Koperasi dan UKM
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan dan hasil bumi dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPekot	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Institusi Perizinan, Instansi membidangi tanaman pangan dan Perkebunan, BAPPEDA Aceh, BAPPEDA Kabupaten/Kota,

8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan hasil bumi dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA Instansi membidangi tanaman pangan dan Perkebunan,
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan dan perkebunan KADIN
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha tanaman pangan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi tanaman pangan

Fase III (2021-2025)

Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/

2. (Agroindustri berbasis Komoditas Perkebunan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			Institusi	
				2021-2022	2023-2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koorInstansi Bidang dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Inststitusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan Badan Pertanahan
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koorInstansi Bidang dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan Badan Pertanahan
		Mengantisipasi terjadinya <i>illegal loging</i>	Memberikan tindakan tegas bagi pihak-pihak yang melakukan <i>illegal loging</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan Kepolisian	Instansi terkait
		Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku	Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam bidang perkebunan berdasarkan jenis tanaman perkebunan.	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

		usaha dalam bidang perkebunan.						Perizinan Aceh
		Peningkatan koorInstansi Bidangi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan Badan Pertanahan
		Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi bidang perkebunan	Melakukan tindakan persuasif dan argumentatif dalam bentuk sosialisasi penanaman modal bidang perkebunan.	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota yang siap dipasarkan	Melaksanakan koorInstansi Bidangi dan penyusunan peluang strategis investasi di Kabupaten/Kota	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan di Kabupaten/ Kota
		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	Melaksanakan koorInstansi Bidangi dan indentifikasi permasalahan/ hambatan realisasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan BAPPEDA Kabupaten/ Kota
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang perkebunan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal berdasarkan komoditi perkebunan pada masing-masing daerah potensial.	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan di Kabupaten/ Kota	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

			Mendorong penanaman modal bidang perkebunan mengacu pada prioritas komoditi perkebunan yang telah ditetapkan.	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan dan kehutanan di Kabupaten/ Kota	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Meningkatkan akses pelaku usaha bidang perkebunan ke sumber pembiayaan.	Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kredit terkait pengembangan usaha perkebunan.	X	X		Bank Umum Daerah Bank Umum Nasional	Instansi membidangi perkebunan
			Mempertimbangkan pendirian lembaga keuangan yang fokus untuk mendukung sektor perkebunan dan tanaman pangan.	X	X	X	Bank Indonesia Lembaga terkait	Instansi membidangi perkebunan
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam bidang perkebunan.	Melaksanakan pelatihan guna kompetensi tenaga lokal berkaitan dengan bidang perkebunan guna meningkatkan kualitas hasil produksi.	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak program pengembangan perkebunan	Mengevaluasi kemampuan akademi komunitas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas sektor perkebunan.	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Pemerintah Kabupaten/ Kota DPR Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/ Kota Bappeda Kabupaten/ Kota. Instansi Bidang perkebunan di Kabupaten/ Kota. Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

			Memastikan evaluasi yang dilakukan Akademi Komoditas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan usaha bidang perkebunan.	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Pemerintah Kabupaten/ Kota DPR Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/ Kota Bapeda Kabupaten/ Kota Instansi Bidang perkebunan di Kabupaten/ Kota Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan usaha bidang perkebunan.	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat/tenaga lokal yang berusaha dalam bidang perkebunan.	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan. Instansi membidangi tenaga kerja	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Institusi Terkait Lainnya
		Mengevaluasi kebijakan upah minimum provinsi terutama berkaitan dengan tenaga kerja bidang perkebunan.	Mengevaluasi kebijakan upah minimum provinsi terutama berkaitan dengan tenaga kerja bidang perkebunan.	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan. Instansi membidangi tenaga kerja	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Institusi Terkait Lainnya
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green</i>)	Penyusunan pedoman bidang usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi membidangi

	<i>Investment)</i>							Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	Instansi membidangi perkebunan.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi Bidang Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perkebunan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Perkebunan Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang perkebunan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	Instansi membidangi Lingkungan Hidup Instansi membidangi perkebunan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	Meningkatkan sinergitas antara koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha bidang perkebunan.	Mengevaluasi kemampuan koperasi dalam mendukung produktivitas sektor perkebunan	X	X	X	Instansi membidangi Koperasi dan UKM Instansi terkait lainnya	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara koperasi dan bidang usaha perkebunan.	X	X	X	Instansi membidangi Koperasi dan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan

							UKM Instansi membidangi perkebunan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan Aceh Kabupaten/ Kota
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perkebunan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	X	X	X	Instansi membidangi Koperasi dan UKM Instansi membidangi perkebunan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha perkebunan besar dengan koperasi dan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara usaha perkebunan dengan UKM	X	X	X	Instansi membidangi Koperasi dan UKM Instansi membidangi perkebunan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Pengembangan peluang investasi bidang perkebunan yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	Instansi membidangi Koperasi dan UKM Instansi membidangi perkebunan Pemerintah	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

							Kabupaten/ Kota	
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perkebunan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota/Pemkot	X	X	X	Instansi membidangi Koperasi dan UKM Instansi membidangi perkebunan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha perkebunan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha perkebunan dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi membidangi Perkebunan	BAPPEDA
		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (<i>well targeted</i>)	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha perkebunan dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi perkebunan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha perkebunan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi perkebunan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Fase III (2021-2025)

Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/

3. (Agroindustri Berbasis Bidang Peternakan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			Institusi	
				2021-2024	2025-2028	2029-2032	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang peternakan. Badan Pertanahan
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang peternakan. Badan Pertanahan
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X	X	X	Instansi Bidang peternakan. Badan Pertanahan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Peningkatan koorInstansi Bidangi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	X	Instansi Bidang peternakan. Badan Pertanahan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung	Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan	Instansi Bidang peternakan Badan Pertanahan

		realisasi investasi					Perizinan Aceh	
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi peternakan di Kabupaten/Kota yang siap dipasarkan	Melaksanakan koorInstansi Bidangi dan penyusunan peluang strategis investasi di Kabupaten/Kota	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Institusi Perizinan Instansi Bidang peternakan
		Identifikasi kebutuhan fasilitas peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	Melaksanakan koorInstansi Bidangi dan indentifikasi permasalahan/hambatan realisasi peluang investasi strategis di Kabupaten/Kota	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Institusi Perizinan Instansi Bidang peternakan
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang peternakan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal berdasarkan jenis usaha peternakan pada masing-masing daerah potensial.	X	X	X	Institusi Perizinan Instansi Bidang peternakan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Mendorong penanaman modal bidang peternakan mengacu pada prioritas potensi usaha peternakan yang sudah diidentifikasi.	X	X	X	Institusi Perizinan Instansi Bidang peternakan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha peternakan	Mendorong pelatihan berkaitan pengembangan peternakan.	X	X	X	Instansi Bidang peternakan	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

		Mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja bidang peternakan.	Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peternakan.	X	X	X	Pemerintah Kabupaten/ Kota DPR Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/ Kota Bapeda Kabupaten/ Kota Disnak Kabupaten/ Kota Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Mengevaluasi program pendidikan pada akademi komunitas yang berkaitan dengan bidang peternakan.	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII. Instansi membidangi peternakan.	Pemerintah Kabupaten/ Kota Bapeda Kabupaten/ Kota Instansi Bidang peternakan. Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan usaha bidang peternakan.	Mendorong peningkatan kualitas belajar-mengajar pada akademi komunitas terutama program studi bidang peternakan.	X	X	X	Instansi membidangi peternakan. Instansi membidangi tenaga kerja.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Institusi Terkait Lainnya
			Menyiapkan dan meningkatkan profesionalitas tenaga teknis dan melakukan penyuluhan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha peternakan.	X	X	X	Instansi membidangi peternakan. Instansi membidangi tenaga kerja.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Institusi Terkait

								Lainnya
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot	X	X	X	Disnak Aceh	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi membidangi lingkungan hidup
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang peternakan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	Instansi membidangi peternakan. Instansi membidangi lingkungan hidup	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi membidangi lingkungan hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot	X	X	X	Instansi membidangi peternakan. Instansi membidangi lingkungan hidup	Instansi Bidang peternakan. Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang peternakan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Disnak Aceh

6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)	Mengidentifikasi faktor determinan peningkatan kinerja koperasi terutama koperasi simpan pinjam.	Merumuskan model kompetensi pengelolaan koperasi di kabupaten kota.	X	X	X	Instansi membidangi Koperasi dan UKM Instansi terkait lainnya	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara koperasi dan bidang usaha peternakan.	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang peternakan.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Kabupaten/ Kota
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UKM, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang peternakan.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha peternakan besar dengan koperasi dan UKM	Pengembangan model kerjasama intiplasma atau keterkaitan antara usaha peternakan dengan UKM	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang peternakan.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Pengembangan peluang investasi bidang peternakan yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM. Instansi Bidang peternakan.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang peternakan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot	X	X	X	SKPK urusan peternakan. Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi terkait.
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha peternakan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha peternakan dan yang terkait	X	X		Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Disnak Aceh	BAPPEDA
		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (<i>well targeted</i>)	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha peternakan dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang peternakan. KADIN
		Mengikuti pameran investasi di bidang usaha peternakan		X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang peternakan.

Fase III (2021-2025)

Fokus Pengembangan Pangan & Agroindustri/

4. (Pengembangan Komoditas Perikanan)

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			Institusi	
				2021-2022	2023-2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal;	Peningkatan fasilitasi perizinan oleh untuk penanaman modal yang siap direalisasikan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan	X	X	X	Institusi penanaman modal dan perizinan	Instansi Bidang perikanan
			Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan	X	X	X	Institusi penanaman modal dan perizinan	Instansi Bidang Kelautan dan Perikanan
		Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah pernah direncanakan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah-langkah terobosan untuk percepatan realisasi proyek	X	X	X	Instansi Bidang Kelautan dan Perikanan	Institusi penanaman modal dan perizinan
		Peningkatan koorInstansi Bidangi untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan	Melakukan koorInstansi Bidangi dengan instansi terkait berkenaan dengan kepastian status kepemilikan lahan	X	X	X	Instansi Bidangperikana n. Badan Pertanahan	Institusi penanaman modal dan perizinan
		Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi	Melaksanakan pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Institusai penanaman modal.
		Mengantisipasi terjadinya illegal fishing dalam usaha	Melakukan tindakan tegas pada pelaku illegal fishing	X	X	X	Kepolisian. Instansi Bidangperikana	Institusi penanaman modal dan

		perikanan tangkap					n.	perizinan
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Menginventarisasi dan mengidentifikasi prasarana dan tata ruang perikanan budidaya, sarana dan prasarana perbenihan, pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya	Menginventarisasi dan mengidentifikasi prasarana dan perencanaan tata ruang budidaya	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Institusi penanaman modal dan perizinan
			Menginventarisasi dan mengidentifikasi pengembangan sarana dan prasarana perbenihan	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Institusi penanaman modal dan perizinan
			Menginventarisasi dan mengidentifikasi pengembangan produksi dan budidaya usaha	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Institusi penanaman modal dan perizinan
			Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Institusi penanaman modal dan perizinan
			BerkoorInstansi Bidangi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perikanan budidaya	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Institusi penanaman modal dan perizinan
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang perikanan dengan mengacu pada potensi daerah	Mengidentifikasi dan menentukan prioritas penanaman modal berdasarkan jenis usaha perikanan pada masing-masing daerah potensial.	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Institusi penanaman modal dan perizinan
			Mendorong penanaman modal bidang perikanan mengacu pada prioritas potensi usaha perikanan yang sudah diidentifikasi.	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Institusi penanaman modal dan perizinan
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha	Mendorong pelatihan berkaitan pengembangan budidaya perikanan.	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	BLK Kabupaten/ Kota Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Bekerja sama dengan lembaga terkait	X	X	X	Instansi	Lembaga terkait

		perikanan	dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam budaya perikanan.				Bidangperikana n.	termasuk LSM
		Mengevaluasi upaya yang sudah dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja bidang perikanan.	Mengevaluasi program pendidikan pada akademi komunitas yang berkaitan dengan bidang perikanan.	X	X	X	Kopertis Wil XIII Instansi Bidangperikana n.	DPRK/Kota Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan usaha bidang perikanan	Menyiapkan dan meningkatkan profesionalitas tenaga teknis dan melakukan penyuluhan bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha budidaya perikanan.	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Lembaga terkait
			Meningkatan intensitas penyuluhan bagi masyarakat guna meningkatkan hasil produksi perikanan.	X	X	X		
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman bidang usaha perikanan yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha perikanan yang berwawasan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidangperikana n.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi Bidang Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidangperikana n. Instansi Bidanglingkung an hidup.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana	X	X	X	Instansi Bidangperikana	Instansi

		insentif untuk usaha bidang perikanan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot				n. Instansi Bidanglingkung an hidup.	penanaman modal Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang perikanan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	Instansi Bidangperikana n. Instansi Bidanglingkung an hidup.	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	Mengidentifikasi usaha koperasi yang terkait dengan bidang perikanan.	Merumuskan model kompetensi pengelolaan koperasi bidang perikanan.	X	X	X	Instansi Bidang koperasi dan UKM. Instansi Bidangperikana n	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan langkah strategis guna meningkatkan sinergi antara koperasi dan bidang usaha perikanan.	X	X	X	Instansi Bidang koperasi dan UKM. Instansi Bidangperikana n	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Kabupaten/ Kota
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perikanan yang memberikan nilai tambah bagi pemberdayaan UKM, sesuai peraturan yang berlaku	MengkoorInstansi Bidangikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	X	X	X	Instansi Bidang koperasi dan UKM. Instansi Bidangperikana n	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha perikanan dengan koperasi dan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara usaha perikanan dengan UKM	X	X	X	Instansi Bidang koperasi dan UKM. Instansi Bidang perikanan	
			Pengembangan peluang investasi bidang perikanan yang bisa dikelola oleh koperasi				Instansi Bidang koperasi dan UKM. Instansi Bidang perikanan	
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang perikanan dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot	X	X	X	Instansi Bidang perikanan. Pemerintah Kabupaten/ Kota	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi dan peluang bidang usaha perikanan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha perikanan dan sektor pendukungnya.	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi Bidang perikanan.	BAPPEDA
			Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha perikanan dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	KADIN

		Pengembangan strategi promosi yang tepat sasaran (<i>well targeted</i>)	Mengikuti pameran investasi di bidang usaha perikanan.	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang perikanan.
--	--	---	--	---	---	---	--	----------------------------

Fase III (2021-2025)

B. Fokus Pengembangan Infrastruktur

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			Institusi	
				2021-2022	2023-2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki Iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitas perizinan oleh P2T untuk permohonan izin di bidang usaha infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Melakukan koorInstansi Bidang dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitas perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	P2T dan Inststitusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitas penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi terkait	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi skala besar di sektorsektor fokus yang lain	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi terkait	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan koorInstansi Bidang aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi skala	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi terkait	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

			besar di sektor-sektor yang lain					Perizinan Aceh
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang Bina Marga
			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang Bina Marga	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang secara rinci di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang Bina Marga	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pengembangan klaster wilayah dengan kebutuhan investasi sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan di wilayah prioritas	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pengembangan daya saing wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang Bina Marga	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemkot dalam rangka pengembangan sektor infrastruktur yang berdaya saing tinggi, skala besar, dan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	

			mendukung daya saing daerah					
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan(hulu - hilir, jenis komunitas, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	BAPPEDA Aceh Instansi Bidang Bina Marga	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Mengevaluasi output proses perkuliahan kelas jauh yang dilaksanakan oleh PTS-PTS di Aceh.	Menutup seluruh proses kuliah kelas jauh yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Swasta yang melanggar ketentuan perundang-undangan.	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII	DPRD Kabupaten/ Kota Pemda Kabupaten/ Kota terkait
			Melakukan pembinaan PTS dengan mengacu pada Permendiknas dan Dirjen Dikti serta peraturan terkait.	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII	Lembaga Pendidikan Tinggi terkait.
		Mempermudah perizinan pendirian perguruan tinggi yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM.	Meningkatkan koorInstansi Bidang dan kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.	X	X	X	Lembaga Pendidikan Tinggi Kopertis Wilayah XIII Pemda Kabupaten/ Kota	DPRD Kabupaten/ Kota
			Mengevaluasi proses belajar mengajar pada perguruan tinggi yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan terkait.	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII	Pemda Kabupaten/ Kota DPRD Kabupaten/ Kota
		Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam	Melaksanakan pelatihan tenaga kerja berkaitan dengan pembangunan infrastruktur	X	X	X	Pemda Kabupaten/ Kota	Instansi/ Lembaga terkait

		mendukung pembangunan infrastruktur					BLK Kabupaten/ Kota	
			Memprioritaskan penggunaan perusahaan/tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek infrastruktur di daerah dengan mengacu pada kualifikasi yang dibutuhkan.	X	X	X	Perusahaan	Instansi Bidang Bina Marga
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan investasi di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Lingkungan Hidup
			Menyusun mekanisme monev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Lingkungan Hidup
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota/Pemkot	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi terkait
		Mengevaluasi dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan	Menyusun kajian terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan sehubungan dengan pembangunan				Instansi Bidang Lingkungan Instansi Bidang	Instansi terkait Provinsi Aceh.

		pembangunan infrastruktur	infrastruktur.				Kesehatan	
		Pemberian pengakuan publik untuk investor di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Lingkungan Hidup
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM);	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha di sektor infrastruktur skala besar yang menyerap/ memberdayakan SDM lokal	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota/Pemkot	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM Instansi terkait	Kabupaten/ Kota
		Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan koperasi dan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antara bidang infrastruktur dengan koperasi dan UKM	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM instansi terkait	Kabupaten/ Kota
			Pengembangan peluang investasi bidang infrastruktur yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	Instansi Bidang Koperasi dan UKM instansi terkait	Kabupaten/ Kota

7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Pemkot	X	X	X	Kabupaten/ Kota Instansi terkait	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan.	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Bina Marga BAPPEDA
			Mengikuti pameran investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Bina Marga BAPPEDA
			Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Bina Marga BAPPEDA

Fase III (2020-2025)

C. Fokus Pengembangan Energi

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			Institusi	
				2021-2022	2023-2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh P2T untuk permohonan izin di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Melakukan koorInstansi Bidang dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Pemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	dan Inststitusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Instansi Bidang ESDM
		<i>Land banking</i> yang tersedia untuk pengembangan sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi.	Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk pengembangan sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Badan Pertanahan Instansi Bidang ESDM
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi dan yang terkait	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		memasok kebutuhan energi untuk investasi	Melakukan koorInstansi Bidang aktif dan menyusun kerjasama penyediaan	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang	Instansi Bidang Penanaman

		skala besar dan berdaya saing tinggi	infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait.				ESDM	Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi alternative dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	
			Melakukan koorInstansi Bidang aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	Menyusun kajian dan dokumen peluang secara rinci di bidang usaha energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi, di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	
			Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi yang berdaya saing tinggi	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
				Melakukan koorInstansi Bidang aktif dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot dalam rangka pengembangan klaster	X	X	X	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

			bidang energi yang berdaya saing tinggi					Perizinan Aceh
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi (hulu-hilir, keterkaitan antar industri, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA Instansi Bidang ESDM Pemerintah Kabupaten/ Kota
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi bidang energi	Melakukan sosialisasi program pengembangan energi kepada masyarakat di daerah kawasan pengembangan usaha sektor energi.	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang ESDM Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Menyusun kebijakan yang berorientasi pada prioritas penggunaan tenaga kerja lokal bagi investor bidang energi	Menyusun pedoman pemanfaatan tenaga kerja bagi setiap usaha sektor energi dengan mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja lokal.	X	X	X	Instansi Bidang Tenaga Kerja Instansi Bidang ESDM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal terkait dengan pembangunan bidang energi	Mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dalam pembangunan sektor energi.	X	X	X	Instansi Bidang Tenaga Kerja Instansi Bidang ESDM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Meningkatkan kualitas belajar mengajar pada perguruan	Meningkatkan kualitas belajar mengajar pada perguruan	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII	Pemkab /kota Bapeda

			tinggi/akademi komunitas/politeknik program studinya relevan dengan pengembangan sektor energi				Pemerintah Kabupaten/ Kota DPR Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota Instansi Bidang ESDM Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman pengembangan investasi energi alternatif skala besar yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan pengembangan investasi alternatif yang berwawasan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidang Lingkungan Instansi terkait	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Meninjau dan menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidang Lingkungan Instansi terkait	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi dalam pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Pemkot	X	X	X	Instansi Bidang ESDM Instansi Bidang Lingkungan Pemda Kabupaten/ Kota	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pengembangan energi alternatif skala besar yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk "the Green Investor"	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Lingkungan Instansi Bidang ESDM

							Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk pengembangan energi skala besar yang melibatkan UKM atau menyerap tenaga kerja lokal, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot	X	X	X	Instansi Bidang ESDM Instansi Bidang Koperasi dan UKM	dan Institusi perizinan Kabupaten/ Kota Pemda Kabupaten/ Kota Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk investasi di bidang energi dan energi alternatif skala besar yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemekot	X	X	X	Instansi Bidang ESDM Instansi Bidang Koperasi dan UKM	dan Institusi perizinan Kabupaten/ Kota Pemda Kabupaten/ Kota Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi di	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	Instansi Bidang ESDM Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	BAPPEDA Pemda Kabupaten/ Kota

		wilayah yang diprioritaskan						
		Pengembangan strategi promosi yang <i>well targeted</i>	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang ESDM
			Mengikuti pameran investasi di bidang investasi energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang ESDM
			Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang energi alternatif dan energi untuk memasok kebutuhan energi untuk investasi skala besar dan berdaya saing tinggi	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	KADIN Instansi Bidang ESDM

Fase III (2020-2025)

D. Fokus Pengembangan Pariwisata

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Tahun			Institusi	
				2021-2022	2023-2024	2025	Utama	Pendukung
1	Memperbaiki iklim Penanaman Modal	Pengembangan fasilitasi perizinan oleh untuk permohonan izin di bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	Melakukan koorInstansi Bidang dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemkot berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan.	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	dan Inststitusi Perizinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Instansi membidangi pariwisata. Asosiasi Industri Pendukung Pariwisata, dan LembagaTerkait Lainnya
			Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun daerah tujuan wisata.	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi pariwisata Badan Pertanahan
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata	Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	X	X	X	Instansi membidangi pariwisata Asosiasi Industri Pendukung Pariwisata dan LembagaTerkait Lainnya	Instansi membidangi penanaman modal.

			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	X	X	X	BAPPEDA, dan Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Pariwisata, Instansi Bidang PU & ESDM, Kabupaten/ Kota, Asosiasi Industri Pariwisata
		Mengupayakan pengembangan sektor pariwisata tidak bertentangan dengan penerapan syariah Islam.	Mengevaluasi dampak sosial budaya sektor pariwisata terhadap masyarakat	X	X	X	Instansi membidangi penerapan syariah Islam. Instansi membidangi Pariwisata,	Instansi terkait
2	Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pariwisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah	Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan DTW baru, DTW berbasis kebudayaan, atau meningkatkan daya saing DTW yang telah ada.	X	X	X	Instansi membidangi Pariwisata,	Instansi membidangi penanaman modal BAPPEDA, Instansi Bidang PU & ESDM, BAPPEDA Aceh BAPPEDA Kabupaten/ Kota,
			Melakukan koorInstansi Bidangi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan	X	X	X	BAPPEDA dan Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Pariwisata,. Instansi Bidang PU & ESDM, Instansi yagn

								mengurusi Perhubungan, Kabupaten/ Kota, Asosiasi Industri Pariwisata
		Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata	Menyusun kajian dan dokumen peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan yang terkait di kawasan pengembangan pariwisata	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata
		Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi	Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata yang berdaya saing tinggi di kawasan pengembangan Pariwisata	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata
			Melakukan koordinasi dengan Instansi Bidang terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Pemkot dalam rangka pengembangan kawasan strategis pariwisata	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Pariwisata. Asosiasi Industri Pariwisata
3	Mengembangkan Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll)	Menentukan prioritas pengembangan kawasan strategis pariwisata	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata
4	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Lokal	Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang	Mendorong pelatihan berkaitan pengembangan sektor pariwisata	X	X	X	Instansi membidangi Pariwisata,	Instansi Bidang Penanaman Modal dan

		bergerak dalam bidang usaha pariwisata daerah					Pelayanan Perizinan Aceh
		Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pariwisata daerah.	X	X	X	Instansi membidangi Pariwisata,	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
	Mempersiapkan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama penggerak program pengembangan pariwisata	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam mendukung program pariwisata daerah.	X	X	X	Instansi membidangi Pariwisata,	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Mengevaluasi proses pembelajaran pada akademi komunitas yang berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia bidang pariwisata di daerah tujuan utama wisata	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Instansi membidangi Pariwisata,	Pemerintah Kabupaten/ Kota Bapeda Kabupaten/ Kota Instansi membidangi Pariwisata, Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Mengevaluasi kualitas lulusan akademi komunitas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pengembangan program pariwisata daerah.	X	X	X	Kopertis Wilayah XIII Instansi Bidang pariwisata.	Pemerintah Kabupaten/ Kota Bapeda Kabupaten/ Kota Instansi Bidang pariwisata. Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh

5	Mengembangkan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	Menyusun panduan bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidang pariwisata. Instansi Bidang Lingkungan Hidup	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Menyusun mekanisme money untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan	X	X	X	Instansi Bidang pariwisata. Instansi Bidang Lingkungan Hidup	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
		Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi Bidang pariwisata. Instansi Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan	Memberikan <i>award</i> tahunan untuk " <i>the Green Investor</i> "	X	X	X	Instansi Bidang pariwisata. Instansi Bidang Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten/ Kota	Instansi Bidang Pariwisata Pemerintah Kabupaten/ Kota
6	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata yang merupakan UKM, sesuai peraturan yang	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait	X	X	X	Instansi Bidang pariwisata. Instansi Bidang Lingkungan Hidup	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh. Pemerintah

		berlaku						Kabupaten/ Kota
		Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata besar dengan UKM	Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dengan UKM	X	X	X	Instansi membidangi Pariwisata, Instansi membidangi Koperasi dan UKM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
			Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata yang bisa dikelola oleh koperasi	X	X	X	Instansi membidangi Pariwisata, Instansi membidangi Koperasi dan UKM	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh
7	Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pariwisata dan yang terkait sesuai peraturan yang berlaku	Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/ KotaPemkot	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Pariwisata, BAPPEDA Aceh, Bapeda Kabupaten/ Kota KADIN Aceh
8	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan	Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi Pariwisata, BAPPEDA Aceh, Bapeda Kabupaten/ Kota KADIN Aceh
		Pengembangan strategi promosi yang well targeted	Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Instansi membidangi pariwisata

							Aceh	
			Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata	X	X	X	Instansi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Aceh	Instansi membidangi pariwisata

**Rencana Fasilitas Realisasi Proyek
Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan
Provinsi Aceh
Tahap Pembangunan**

No	Nama Proyek		Kondisi Saat Ini		Permasalahan Pokok	Langkah Pemecahan Permasalahan
1	PT. UNICOCO INDUSTRIES INDONESIA					
	i	Jenis proyek	: Industri Pengolahan	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 1129/1/IP/PMA/2014	Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	: Desa Pertanian, Kec. Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur	Tanggal SP	: 10/04/2014	
	iii	Status	: PMA	Data Perijinan Daerah	:	
	iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 57.750.000.000	Tanggal Perizinan Daerah	:	
	v	Bidang usaha	: Industri Makanan	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan	
	vi	Produksi	:	Rencana produksi komersial	:	
	vii	Lahan	:	Kontak poin	: (061) 80030070	
	viii	Tenaga kerja Indonesia	:			
	ix	Rencana produksi komersial	:			
	x	Kontak poin	: (061) 80030070			
2	PT. ACEH PALMA INDUSTRIES					
	i	Jenis proyek	: Industri Pengolahan	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 00059/1/PPM/PMA/2010	Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	: Kota Subulussalam	Tanggal SP	: 22/01/2010	
	iii	Status	: PMA	Data Perijinan Daerah	:	
	iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 120.750.000.000	Tanggal Perizinan Daerah	:	
	v	Bidang usaha	: Industri Makanan	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan	
	vi	Produksi	:	Rencana produksi komersial	:	
	vii	Lahan	:	Kontak poin	: Jl. Hang Tuah No. 15 Medan, 061-4157288	
	viii	Tenaga kerja Indonesia	:			
	ix	Rencana produksi komersial	:			
	x	Kontak poin	: Jl. Hang Tuah No. 15 Medan, 061-4157288			
3	PT. GOLDEN CHERSONESE					

	i	Jenis proyek	: Pertanian dan Peternakan	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 1050/1/IP/PMA/2013	Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif		
	ii	Lokasi	: Jl. Sukaramai No. 27-29, Kabupaten Bireun, 0645-41443					
	iii	Status	: PMA				Tanggal SP	: 21/08/2013
	iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 105.000.000.000					
	v	Bidang usaha	: Peternakan				Data Perijinan Daerah	:
	vi	Produksi	:				Tanggal Perizinan Daerah	:
	vii	Lahan	:					
	viii	Tenaga kerja	:				Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan
	ix	Rencana produksi komersial	:					
	x	Kontak poin	: Jl. Sukaramai No. 27-29, Kabupaten Bireun, 0645-41443					
4	PT. NUSANTARA SUSTAINABLE BIOFUELS							
	i	Jenis proyek	: Industri Pengolahan	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 297/1/IP/1/PMA/2011	Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif		
	ii	Lokasi	: Kota Langsa					
	iii	Status	: PMA				Tanggal SP	: 18/05/2011
	iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 57.750.000.000					
	v	Bidang usaha	: Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi				Data Perijinan Daerah	:
	vi	Produksi	:				Tanggal Perizinan Daerah	:
	vii	Lahan	:					
	viii	Tenaga kerja	:				Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan
	ix	Rencana produksi komersial	:					
	x	Kontak poin	: Ruko Millenium Plaza, Blok B No. 17-18, Jl. Kapten Muslim, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia, 0618460277					
5	PT. ANM INDONESIA							
	i	Jenis proyek	: Industri Pengolahan	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 517/1/IP/1/PMA/2011	Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif		
	ii	Lokasi	: Kota Lhokseumawe					
	iii	Status	: PMA				Tanggal SP	: 08/08/2011
	iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 27.825.000.000					
	v	Bidang usaha	: Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi				Data Perijinan Daerah	:
	vi	Produksi	:				Tanggal Perizinan Daerah	:
	vii	Lahan	:					
5								

	viii	Tenaga kerja	:		Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Pembangunan	
	ix	Rencana produksi komersial	:					
	x	Kontak poin	:	Talavera Office Park Lantai 28,~Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, RT 001/RW 001,~Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, 021-7814260				
6	PT. DAYA PRIMAMEGA UTAMA							
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman modal (SP)	:	3/11/IP/PMDN/2014	Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	:	Kabupaten Aceh Utara	Tanggal SP	:	17/03/2014	
	iii	Status	:	PMDN	Data Perijinan Daerah	:		
	iv	Rencana Nilai investasi	:	IDR 1.233.581.800.000	Tanggal Perizinan Daerah	:		
	v	Bidang usaha	:	Listrik, Gas dan Air				
	vi	Produksi	:					
	vii	Lahan	:					
	viii	Tenaga kerja	:		Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Pembangunan	
	ix	Rencana produksi komersial	:					
	x	Kontak poin	:	Kantor Pusat: Jl. Pandan, No. 23, Desa Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, 061-4146525				
7	PT. NUSANTARA AGRI RESOURCES							
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman modal (SP)	:	5/94/IP/1/PMDN/2013	Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	:	Kabupaten Aceh Barat	Tanggal SP	:	25/01/2013	
	iii	Status	:	PMDN	Data Perijinan Daerah	:		
	iv	Rencana Nilai investasi	:	IDR 3.231.000.000.000	Tanggal Perizinan Daerah	:		
	v	Bidang usaha	:	Tanaman Pangan dan Perkebunan				
	vi	Produksi	:					
	vii	Lahan	:					
	viii	Tenaga kerja	:		Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Pembangunan	
	ix	Rencana produksi komersial	:					
	x	Kontak poin	:	Distrik Ilwayab, Tubang Dan Ngguti~kabupaten Merauke - Provinsi Papua,				
8	PT. BLANG ARA COMPANY							
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman modal (SP)	:	8/11/IP/1/PMDN/2011	Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor.
	ii	Lokasi	:	Kota Lhokseumawe				

iii	Status	: PMDN	Tanggal SP	: 08/03/2011		Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif	
iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 191.615.000.000					
v	Bidang usaha	: Tanaman Pangan dan Perkebunan	Data Perijinan Daerah	:			
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:			
vii	Lahan	:					
viii	Tenaga kerja	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan			
ix	Rencana produksi komersial	:					
x	Kontak poin	: JL.MEDAN-BANDA ACEH NO.175, 081216182936					
9 PT. GEBRINA UTAMA							
i	Jenis proyek	:	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 11/11/IP/I/PMDN/2011			Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
ii	Lokasi	: Kabupaten Pidie					
iii	Status	: PMDN	Tanggal SP	: 15/03/2011			
iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 87.086.600.000					
v	Bidang usaha	: Tanaman Pangan dan Perkebunan	Data Perijinan Daerah	:			
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:			
vii	Lahan	:					
viii	Tenaga kerja	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan			
ix	Rencana produksi komersial	:					
x	Kontak poin	: JLN. TGK. MOHD BEUREUEH NO.136, 065121274					
10 PT. MAHARDHIKA AGRO TIRTAMAS							
i	Jenis proyek	:	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 22/11/IP/I/PMDN/2011		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif	
ii	Lokasi	: Kota Subulussalam					
iii	Status	: PMDN	Tanggal SP	: 31/03/2011			
iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 93.842.700.000					
v	Bidang usaha	: Tanaman Pangan dan Perkebunan	Data Perijinan Daerah	:			
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:			
vii	Lahan	:					
viii	Tenaga kerja	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan			
ix	Rencana produksi komersial	:					
x	Kontak poin	: Jl. Panglima Nyak Makam No 21, 06177337337					
11 PT. KAMIRZU							
i	Jenis proyek	:	Data perijinan	: 23/11/IP/I/PMDN/2011		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan	

ii	Lokasi	: Kabupaten Aceh Gayo Lues	penanaman modal (SP)	: 20/11/11/1/PMDN/2011		<p>evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif</p>
iii	Status	: PMDN	Tanggal SP	: 31/03/2011		
iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 51.400.000.000				
v	Bidang usaha	: Listrik, Gas dan Air	Data Perijinan Daerah	:		
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:		
vii	Lahan	:				
viii	Tenaga kerja	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan		
ix	Rencana produksi komersial	:				
x	Kontak poin	Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 , 065132300				
12 PT. SYAUKATH SEJAHTERA						
i	Jenis proyek	:	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 7/11/IP/1/PMDN/2011		<p>Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif</p>
ii	Lokasi	: Kabupaten Bireuen	Tanggal SP	: 08/03/2011		
iii	Status	: PMDN				
iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 75.000.000.000				
v	Bidang usaha	: Industri Makanan	Data Perijinan Daerah	:		
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:		
vii	Lahan	:				
viii	Tenaga kerja	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan		
ix	Rencana produksi komersial	:				
x	Kontak poin	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 683, 0644324499				
13 PT. KHADAFY LIDA						
i	Jenis proyek	:	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 13/11/IP/1/PMDN/2011		<p>Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif</p>
ii	Lokasi	: Kabupaten Aceh Selatan	Tanggal SP	: 15/03/2011		
iii	Status	: PMDN				
iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 155.000.000.000				
v	Bidang usaha	: Listrik, Gas dan Air	Data Perijinan Daerah	:		
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:		
vii	Lahan	:				
viii	Tenaga kerja	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan		
ix	Rencana produksi komersial	:				
x	Kontak poin	Jl. T. Murah Adam Kota Fajar, 0656441400				
14 PT. PERKEBUNAN TUALANG RAYA						

	i	Jenis proyek	:		Data perijinan	:	00030/11/PPM/PMDN/20		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	:	Kabupaten Aceh Timur	penanaman modal (SP)	:	11		
	iii	Status	:	PMDN	Tanggal SP	:	27/06/2011		
	iv	Rencana Nilai investasi	:	IDR 318.233.100.000					
	v	Bidang usaha	:	Tanaman Pangan dan Perkebunan	Data Perijinan Daerah	:			
	vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:			
	vii	Lahan	:						
	viii	Tenaga kerja	:		Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Pembangunan		
	ix	Rencana produksi komersial	:						
	x	Kontak poin	:	Jl. T. Umar No. 21 Gp. PB. Blang Pase Kec. Langsa Kota					
15	PT. DELIMA MAKMUR								
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan	:	1/11/IP/II/PMDN/2012		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	:	Kabupaten Aceh Singkil	penanaman modal (SP)	:			
	iii	Status	:	PMDN	Tanggal SP	:	04/04/2012		
	iv	Rencana Nilai investasi	:	IDR 80.800.000.000					
	v	Bidang usaha	:	Tanaman Pangan dan Perkebunan	Data Perijinan Daerah	:			
	vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:			
	vii	Lahan	:						
	viii	Tenaga kerja	:		Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Pembangunan		
	ix	Rencana produksi komersial	:						
	x	Kontak poin	:	Jl.Putri Hijau Dalam No.4 C-G					
16	PT. GELORA LINTAS ARTHA								
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan	:	10/11/IP/I/PMDN/2011		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	:	Kabupaten Aceh Selatan	penanaman modal (SP)	:			
	iii	Status	:	PMDN	Tanggal SP	:	10/03/2011		
	iv	Rencana Nilai investasi	:	IDR 135.000.000.000					
	v	Bidang usaha	:	Listrik, Gas dan Air	Data Perijinan Daerah	:			
	vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:			
	vii	Lahan	:						
	viii	Tenaga kerja	:		Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Pembangunan		
	ix	Rencana produksi komersial	:						
	x	Kontak poin	:	Jln. Bahagia no.20 , 1398894831					
17	PT. BOSWA MEGALOPOLIS								
	i	Jenis proyek	:	Pertanian dan Peternakan	Data perijinan	:	1/11/IP/II/PMDN/2011		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan

ii	Lokasi	: Kabupaten Aceh Jaya	penanaman modal (SP)	: 2/11/11/PPM/I/PMDN/2011		<p>evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif</p>
iii	Status	: PMDN	Tanggal SP	: 29/03/2011		
iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 150.000.000.000				
v	Bidang usaha	: Tanaman Pangan dan Perkebunan	Data Perijinan Daerah	:		
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:		
vii	Lahan	:				
viii	Tenaga kerja	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan		
ix	Rencana produksi komersial	:				
x	Kontak poin	: panin tower lantai 11, jl. asia afrika lot.19 kel.gelora kec. tanah abang. 021-72781771				
18 PT. PUTRA KURNIA						
i	Jenis proyek	: Pertanian dan Peternakan	Data perijinan penanaman modal (SP)	: 57/11/PPM/I/PMDN/2012		<p>Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif</p>
ii	Lokasi	: Kabupaten Aceh Timur	Tanggal SP	: 21/06/2012		
iii	Status	: PMDN				
iv	Rencana Nilai investasi	: IDR 59.605.600.000	Data Perijinan Daerah	:		
v	Bidang usaha	: Tanaman Pangan dan Perkebunan	Tanggal Perizinan Daerah	:		
vi	Produksi	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan		
vii	Lahan	:				
viii	Tenaga kerja	:				
ix	Rencana produksi komersial	:				
x	Kontak poin	:				
19 PT. Bahari Dwi Kencana Lestari						
i	Jenis proyek	: Industri Pengolahan	Data perijinan penanaman modal (SP)	:		<p>Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif</p>
ii	Lokasi	: Desa Alur Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang	Tanggal SP	:		
iii	Status	:				
iv	Rencana Nilai investasi	: 79.661.774.449	Data Perijinan Daerah	: No. 529/T/Industri/2009		
v	Bidang usaha	: Pengolahan Kelapa Sawit	Tanggal Perizinan Daerah	:		
vi	Produksi	:	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	: Pembangunan		
vii	Lahan	:				
viii	Tenaga kerja	:				
ix	Rencana produksi komersial	:				
x	Kontak poin	: Desa Alur Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang				

20	PT. Wira Insani Mega Sarana					
i	Jenis proyek	:		Data perijinan	:	No.00084/1/PPM/PMDN/
ii	Lokasi	:	Aceh Barat Daya	penanaman modal (SP)	:	2010
iii	Status	:		Tanggal SP	:	29/01/2010
iv	Rencana Nilai investasi	:	IDR 150.000.000.000		:	
v	Bidang usaha	:	Industri Minyak Kasar (minyak makan)	Data Perijinan Daerah	:	
vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:	
vii	Lahan	:			:	
viii	Tenaga kerja	:		Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Pembangunan
ix	Rencana produksi komersial	:			:	
x	Kontak poin	:	Jln. Ciliwung No.7 Surabaya 60227 Tlp. 031 5663481 Fax. 031 567479		:	

Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif

Sumber : Badan Investasi dan Promosi Aceh Nov 2014, diolah

PMA dan PMDN tahap pembangunan berkategori Strategis, dengan kriteria:

a. PMA dan PMDN minimal nilai rencana investasi Rp. 40 M (kurs US \$ 1=10.500)

c. Termasuk sektor unggulan, dan diusulkan sebagai sektor potensi investasi pada Roadmap

**Rencana Fasilitas Realisasi Proyek
 Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan
 Provinsi Aceh
 Tahap Produksi**

No	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah Pemecahan Permasalahan
1	PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA			
	i	Jenis proyek : Industri Pengolahan		
	ii	Lokasi : Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM.17, Lhoknga P.O.Box 30, Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam	Data perijinan penanaman modal (SP) : 164/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011	
	iii	Status : PMA	Tanggal SP : 09/08/2011	
	iv	Nilai investasi : IDR 3.160.008.600.000		
	v	Bidang usaha : Industri Semen	Data Perijinan Daerah :	
	vi	Produksi :	Tanggal Perizinan Daerah :	
	vii	Lahan :		
	viii	Tenaga kerja Indonesia : 371	Status Tahap Pelaksanaan Proyek : Produksi	
	ix	Rencana produksi komersial : -		
x	Kontak poin : The Royal Condominium Lantai 2 Tower A, Jl. Palang Merah No. 1, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun			
2	PT. Pupuk Iskandar Muda			
	i	Jenis proyek : Industri Pengolahan	Data perijinan penanaman modal (SP) : 57/I/PMDN/1983	
	ii	Lokasi : Aceh Utara		
	iii	Status : PMDN	Tanggal SP : 21/04/1983	
	iv	Nilai investasi : IDR 4.148.362.184.015		
v	Bidang usaha : Industri Pupuk Urea dan Ammonia	Data Perijinan Daerah : 89/T/INDUSTRI/1985		

	vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:	15/08/1985				terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	vii	Lahan	:								
	viii	Tenaga kerja Indonesia	:	481	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Produksi				
	ix	Rencana produksi komersial	:								
	x	Kontak poin	:								
3	PT. Perkebunan Lembah Bhakti										
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman modal (SP)	:	229/I/PMDN/1985				Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	:	Aceh Selatan							
	iii	Status	:		Tanggal SP	:	13/12/1985				
	iv	Nilai investasi	:	IDR 150.088.000.000							
	v	Bidang usaha	:	Perkebunan K.Sawit terpadu dengan Unit Pengolahannya menjadi Minyak Sawit dan Inti Sawit	Data Perijinan Daerah	:	185/PERTANIAN/INDUSTRI/2005				
	vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:					
	vii	Lahan	:								
	viii	Tenaga kerja Indonesia	:	1064	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Produksi				
	ix	Rencana produksi komersial	:								
	x	Kontak poin	:								
4	PT Mopoly Raya										
	i	Jenis proyek	:	Perkebunan	Data perijinan penanaman modal (SP)	:	812/INDUSTRI/2000, dan				Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak
	ii	Lokasi	:	Aceh Timur, dan Desa Alue Kuyun Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat			41/II/PMDN/1987				
	iii	Status	:		Tanggal SP	:	08/02/2000, dan				
	iv	Nilai investasi	:	IDR 283.988.739.588,00			10/04/1987				

v	Bidang usaha	:	Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahannya	Data Perijinan Daerah	:	812/T/INDUSTRI/2000, dan 503/KP2TSP/684/2010			terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:	08/02/2000, dan 24 Juni 2010			
vii	Lahan	:							
viii	Tenaga kerja	:	606	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Produksi			
ix	Rencana produksi komersial	:							
x	Kontak poin	:	Desa Alue Kuyun Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat						
5	PT. Beurata Subur Persada								
i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman modal (SP)	:	00064/11/PPM/PMD N/2011			Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
ii	Lokasi	:	Nagan Raya	Tanggal SP	:	14/11/2011			
iii	Status	:							
iv	Nilai investasi	:	IDR 212.097.449.000						
v	Bidang usaha	:	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Data Perijinan Daerah	:	Pendaftaran PM Aceh			
vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:				
vii	Lahan	:							
viii	Tenaga kerja Indonesia	:	88	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Produksi			
ix	Rencana produksi komersial	:	-						
x	Kontak poin	:							
6	PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS								
i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman modal (SP)	:	00003/11/PPM/PMD N/2010			Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak
ii	Lokasi	:	Kabupaten Aceh Jaya	Tanggal SP	:	30/12/2010			
iii	Status	:	PMDN						
iv	Rencana Nilai investasi	:	IDR 545.538.500.000						
v	Bidang usaha	:	Industri Makanan	Data Perijinan Daerah	:				
vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:				

	ix	Rencana produksi komersial	:	-					
	x	Kontak poin	:						
9	PT. Karya Tanah Subur								
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman modal (SP)	:	292/I/PMDN/1986		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	:	Aceh Barat	Tanggal SP	:	16/12/1986		
	iii	Status	:						
	iv	Nilai investasi	:	IDR 212.097.449.000					
	v	Bidang usaha	:	Perkebunan Kelapa Sawit terpadu	Data Perijinan Daerah	:	589/T/PERTANIAN/1996		
	vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:	24/09/1996		
	vii	Lahan	:						
	viii	Tenaga kerja	:	644	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Produksi		
	ix	Rencana produksi komersial	:						
	x	Kontak poin	:						
10	PT. Teunggulon Raya								
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman modal (SP)	:	030/11/IP/I/PMDN/2011		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
	ii	Lokasi	:	Aceh Tamiang	Tanggal SP	:	06/06/2011		
	iii	Status	:						
	iv	Nilai investasi	:	IDR 638.890.368					
	v	Bidang usaha	:	Perkebunan Kelapa Sawit terpadu	Data Perijinan Daerah	:	Izin Prinsip PM / BP2T		
	vi	Produksi	:		Tanggal Perizinan Daerah	:	24/09/1996		
	vii	Lahan	:						
	viii	Tenaga kerja	:	105	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Produksi		
	ix	Rencana produksi komersial	:						
	x	Kontak poin	:						
11	PT. Surya Panen Subur								
	i	Jenis proyek	:		Data perijinan penanaman	:	03/11/IP/II/PMDN/2		Membentuk tim Task Force untuk

v	Bidang usaha	: Agro Bisnis dan Agro Sawit	Data Perijinan Daerah	:			masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:			
vii	Lahan	:					
viii	Tenaga kerja	: 6740	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Produksi		
ix	Rencana produksi komersial	:					
x	Kontak poin	:					
14	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera 1						
i	Jenis proyek	:	Data perijinan penanaman modal (SP)	:	033/11/IP/I/PMDN/2011		Membentuk tim Task Force untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi oleh investor. Sekaligus membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi secara proaktif, dengan melibatkan pihak terkait agar memperoleh solusi yang komprehensif
ii	Lokasi	: Nagan Raya	Tanggal SP	:	04/08/2011		
iii	Status	:					
iv	Nilai investasi	: IDR 1.546.051.765.381					
v	Bidang usaha	: Ketenaga Listrikan	Data Perijinan Daerah	:	Izin Prinsip PM/ BP2T		
vi	Produksi	:	Tanggal Perizinan Daerah	:			
vii	Lahan	:					
viii	Tenaga kerja	: 285	Status Tahap Pelaksanaan Proyek	:	Produksi		
ix	Rencana produksi komersial	:					
x	Kontak poin	:					

Sumber : Badan Investasi dan Promosi Aceh Nov 2014, diolah

PMA dan PMDN tahap produksi berkategori Strategis, dengan kriteria:

- a. PMA dan PMDN dengan minimal nilai investasi Rp. 100 M (kurs US \$ 1=10.500)
- c. Termasuk sektor unggulan, dan diusulkan sebagai sektor potensi investasi pada Roadmap

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 09 Desember 2014
17 Shafar 1436

GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH